



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

Jalan Bypass Alang – Alang Lebar, Talang
Kelapa, Kecamatan Alang - Alang Lebar,
Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30961

TELP : 0711 – 571681

Email : BPTD_KelasII_Sumsel@kemenhub.go.id

   : bptdsumsel

 : bptd_sumsel

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
NOMOR: SK-BPTD SUMSEL 10 Tahun 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kementerian Perhubungan, maka perlu adanya penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2026;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BPTD KELAS II SUMATERA SELATAN TAHUN 2026**
- PERTAMA :** Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis *output* yang digunakan oleh masing-masing Sub Bagian dan Seksi pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan untuk menetapkan:
- a. rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. menyusun laporan kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
- KETIGA :** Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan harus menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT :** Indikator Kinerja Kegiatan mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- KELIMA :** Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan; dan
 - b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran untuk tingkat Eselon II dan Sub Bagian dan Seksi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.

- KEENAM : Hasil penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- KETUJUH : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha; Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan; Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan Kepala Seksi Lalu Lintas, Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 04 Januari 2026

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan



Nurnadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat; dan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Lampiran Keputusan
Kepala BPTD Kelas II Sumatera Selatan
Nomor : SK-BPTD SUMSEL 10 Tahun 2026
Tanggal : 04 Januari 2026

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK1.1.2	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi DTPK	IKK 1.1.2	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	
DEFINISI				
Jumlah Layanan Subsidi transportasi angkutan jalan adalah Jumlah layanan angkutan jalan penumpang yang disubsidi pemerintah dalam satu tahun anggaran, meliputi trayek/koridor, rute operasi, atau unit layanan lain di wilayah yang anggaran berada pada BPTD/UPT.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat - Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 1.1.2 = \sum \text{realisasi trayek layanan subsidi transportasi angkutan jalan dalam satu tahun anggaran}$				
SATUAN				
Layanan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
4	4	5	5	5
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1.2	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	IKK 1.2.1	Jumlah Layanan Subsidi Transportasi ASDP Wilayah DTPK
DEFINISI			
Jumlah Layanan Subsidi transportasi ASDP wilayah DTPK adalah Jumlah layanan angkutan ASDP yang disubsidi pemerintah dalam satu tahun anggaran, meliputi trayek/koridor, rute operasi, atau unit layanan lain di wilayah yang anggaran berada pada BPTD/UPT.			

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK1.2	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	IKK 1.2.2	Jumlah Pembangunan Pelabuhan ASDP untuk Mendukung Konektivitas	
DEFINISI				
Jumlah Pelabuhan ASDP yang dibangun sampai dengan beroperasi sesuai Ketentuan Menteri dengan anggaran yang berada pada BPTD/UPT.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Transportasi, Sungai, Danau dan Penyeberangan, Ditjen Perhubungan Darat - Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan - Satuan Pelayanan Pelabuhan ASDP				
CARA MENGHITUNG				
<i>IKK 1.2 .2 = ∑ realisasi pembangunan pelabuhan ASDP dalam satu tahun anggaran</i>				
SATUAN				
Unit				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
-	2	-	-	4
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 2.1.3	Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM
DEFINISI			
Jumlah Operasional Layanan Terminal Tipe A sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan yang anggarannya berada pada BPTD/UPT.			

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan		IKK 2.1.7	Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan Pelayanannya untuk Memenuhi SPM	
DEFINISI					
Jumlah Operasional Layanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan yang anggarannya berada pada BPTD/UPT.					

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 2.1.9	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	
DEFINISI				
Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ adalah Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi LLAJ di luar kegiatan pengawasan keselamatan dan dukungan manajemen yang anggarannya berada pada BPTD/UPT.				
SUMBER DATA				
• Sub Bagian Tata Usaha • Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan • Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan • Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan • Satuan Pelayanan Terminal Tipe A • Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 2.1.9 = \sum \text{realisasi kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ dalam satu tahun anggaran}$				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
13	15	16	16	16
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Sub Bagian Tata Usaha Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.2	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 2.2.2	Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM	
DEFINISI				
Jumlah Operasional Layanan Pelabuhan ASDP sesuai SPM dan ketentuan lainnya terkait pelayanan yang anggarannya berada pada BPTD/UPT.				
SUMBER DATA				
- Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan - Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 2.2.2 = \sum \text{realisasi operasional layanan pelabuhan ASDP sesuai SPM dalam satu tahun anggaran}$				
SATUAN				
Unit				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
4	4	6	6	6
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.2	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	IKK 2.2.4	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLASDP	
DEFINISI				
Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi LLASDP di luar kegiatan pengawasan keselamatan dan dukungan manajemen yang anggarannya berada pada BPTD/UPT.				
SUMBER DATA				
- Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan - Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan - Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP				
CARA MENGHITUNG				
$IKK\ 2.2.4 = \sum \text{realisasi kegiatan monitoring dan evaluasi terkait Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi LLASDP dalam satu tahun anggaran}$				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
5	9	9	9	9
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan				

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 2.2	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP		IKK 2.2.6	Pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan	
DEFINISI					
pengawasan OTP (<i>On Time Performance</i>) di Pelabuhan Penyeberangan merupakan Kegiatan Operasional Pengawasan OTP di Provinsi Sumatera Selatan yang anggarannya berada pada BPTD/UPT.					
SUMBER DATA					
• Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan • Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api					
CARA MENGHITUNG					
$IKK\ 2.2.6 = \sum \text{realisasi Operasional Pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan dalam satu tahun anggaran}$					
SATUAN					
Unit					
TARGET					
	2025	2026	2027	2028	2027
	1	1	1	1	1
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan					

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.1	Jumlah Kegiatan Peningkatan Keselamatan Angkutan Penumpang		
DEFINISI					
Kegiatan pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi serta pelaksanaan operasional angkutan untuk menjamin terpenuhinya standar keselamatan, baik bagi penumpang meliputi <i>Ramp Check</i> , pemeriksaan kelaikan kendaraan, yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT.					
SUMBER DATA					
- Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Satuan Pelayanan Terminal Tipe A					
CARA MENGHITUNG					
$IKK\ 3.1.1 = \sum \text{realisasi kegiatan peningkatan keselamatan angkutan penumpang dalam satu tahun anggaran}$					
SATUAN					
Kegiatan					
TARGET					
	2025	2026	2027	2028	2027
	26	26	26	26	26
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan					

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIK TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.2	Jumlah Kegiatan Peningkatan Keselamatan Angkutan Barang
DEFINISI			
Kegiatan pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi serta pelaksanaan operasional angkutan untuk menjamin terpenuhinya standar keselamatan bagi muatan barang dan pengguna lainnya meliputi <i>Ramp Check</i> , pemeriksaan kelaikan kendaraan yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT.			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 3.2	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi <i>Active</i> dan <i>Passive Safety</i>	IKK 3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan Pedoman
DEFINISI			
Proses verifikasi desain dan konstruksi kendaraan hasil modifikasi atau karoseri untuk memastikan kesesuaian standar teknis, keselamatan, dan laik jalan dengan ketentuan SKRB yang dimiliki sebelum diproduksi massal atau digunakan di jalan, yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT.			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIK TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 3.2	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi <i>Active</i> dan <i>Passive Safety</i>	IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB
DEFINISI			
Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB adalah jumlah UPUPKB di wilayah kerja yang telah dikalibrasi seluruh alat ujinya oleh BPTD, yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT.			
</			

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 3.3	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Jalan yang dipasang sesuai dengan Spesifikasi Teknis pada Jalan Nasional dan Non Nasional (Bantuan Teknis)		
DEFINISI					
Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda, yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT Adapun 10 (sepuluh) item dimaksud meliputi:					
1) Alat Penerangan Jalan;					
2) Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas smart system;					
3) Marka Jalan;					
4) Lampu Peringatan Pemakai Jalan;					
5) Paku Jalan;					
6) Rambu Lalu Lintas;					
7) Rambu Tiang Gawang;					
8) Rambu Tiang F;					
9) Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan; dan					
10) Pagar Pengaman Jalan;					
Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Tnis Perlengkapan Jalan					
SUMBER DATA					
• Direktorat Lalu Lintas Jalan, Ditjen Perhubungan Darat					
• Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan					
CARA MENGHITUNG					
$IKK\ 3.3.1 = \sum \text{realisasi unit item perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis pada jalan nasional dan non nasional (bantuan teknis) dalam satu tahun anggaran}$					
SATUAN					
Unit					
TARGET					
2025	2026	2027	2028	2029	
3	3	6	6	6	
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan					
Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan					

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 3.3	Menurunnya Jumlah Titik Konflik Lalu Lintas Jalan	IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	
DEFINISI				
Jumlah LRK yang terdapat dalam Studi SID yang telah di intervensi dengan kebijakan pencegahan termasuk pemasangan perlengkapan jalan dll, yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Lalu Lintas Jalan, Ditjen Perhubungan Darat - Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan				
CARA MENGHITUNG				
<i>IKK 3.3.2 = $\sum$ realisasi Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman dalam satu tahun anggaran</i>				
SATUAN				
Lokasi				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
4	2	12	12	12
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 3.4	Meningkatnya Kesadaran & <i>Attitude</i> Pengguna Jalan Berkeselamatan	IKK 3.4.1	Jumlah Kegiatan Kampanye Keselamatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan Keselamatan LLAJ	
DEFINISI				
Serangkaian upaya komunikasi, edukasi, dan sosialisasi yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, sikap, serta perilaku masyarakat dalam berlalu lintas dan menggunakan angkutan jalan yang aman, tertib, dan berkeselamatan, yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT.				
SUMBER DATA				
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan - Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan				
CARA MENGHITUNG				
<i>IKK 3.4.1 = $\sum$ realisasi kegiatan kampanye keselamatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ dalam satu tahun anggaran</i>				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
1	1	1	1	1
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan				

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK 3.4	Meningkatnya Kesadaran & <i>Attitude</i> Pengguna Jalan Berkeselamatan	IKK 3.4.2	Jumlah Kegiatan SALUD yang dilaksanakan untuk meningkatkan Keselamatan LLAJ		
DEFINISI					
Program edukasi keselamatan yang bertujuan menanamkan kesadaran dan perilaku tertib berlalu lintas sejak usia dini melalui pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak, yang dibiayai oleh anggaran BPTD/UPT.					
SUMBER DATA					
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan - Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan					
CARA MENGHITUNG					
<i>IKK 3.4.2 = $\sum$ realisasi Kegiatan SALUD yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan LLAJ dalam satu tahun anggaran</i>					
SATUAN					
Kegiatan					
TARGET					
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	1	1	1	1
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan					

PROGRAM				
DUKUNGAN MANAJEMEN				
KEGIATAN				
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	
DEFINISI				
Kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang transportasi darat di Provinsi Sumatera Selatan.				
SUMBER DATA				
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan - Sub Bagian Tata Usaha				
CARA MENGHITUNG				
IKK 4.1 = $\sum$ realisasi kegiatan perencanaan pembangunan Ditjen Perhubungan Darat dalam satu tahun anggaran (penyusunan RKKL pagu kebutuhan, pagu indikatif, pagu anggaran, pagu alokasi dan reviu Renstra)				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
5	5	5	5	5
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan				
Sub Bagian Tata Usaha				

PROGRAM				
DUKUNGAN MANAJEMEN				
KEGIATAN				
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.2	Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja	
DEFINISI				
Kegiatan terkait dengan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah (Sumber: PM 85 Tahun 2020).				
SUMBER DATA				
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan - Sub Bagian Tata Usaha				
CARA MENGHITUNG				
IKK 4.2 = $\sum$ realisasi kegiatan akuntabilitas kinerja dalam satu tahun anggaran (penyusunan Perjanjian Kinerja, LMCK Triwulanan dan LKIP, Dokumen MR Triwulanan dan Laporan Tahunan MR, Dokumen SPIP Tahunan)				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
4	4	4	4	4
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan				
Sub Bagian Tata Usaha				

PROGRAM									
DUKUNGAN MANAJEMEN									
KEGIATAN									
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT									
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN						
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat		IKK 4.3	Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran					
DEFINISI									
Kegiatan terkait dengan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan kinerja tata kelola keuangan.									
SUMBER DATA									
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan - Sub Bagian Tata Usaha									
CARA MENGHITUNG									
IKK 4.3 = $\sum$ realisasi kegiatan kinerja pelaksanaan anggaran dalam satu tahun anggaran (revisi anggaran, pemanfaatan BMN/Aset (PNBP), pelaporan UAKPA (Unit Akuntansi KPA) dan UAKPB (Unit Akuntansi Pengguna Barang))									
SATUAN									
Kegiatan									
TARGET									
2025		2026		2027		2028		2029	
3		3		3		3		3	
PENANGGUNG JAWAB									
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan									
Sub Bagian Tata Usaha									

PROGRAM				
DUKUNGAN MANAJEMEN				
KEGIATAN				
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.4	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset	
DEFINISI				
Kegiatan terkait dengan Peningkatan Kinerja pengelolaan Aset dan BMN yang dibiayain dengan Anggaran BPTD/UPT.				
SUMBER DATA				
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan - Sub Bagian Tata Usaha				
CARA MENGHITUNG				
IKK 4.4 = $\sum$ realisasi kegiatan pengelolaan aset dalam satu tahun anggaran				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
1	1	1	1	1
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Sub Bagian Tata Usaha				

PROGRAM				
DUKUNGAN MANAJEMEN				
KEGIATAN				
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.5	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN	
DEFINISI				
Persentase tindak lanjut rekomendasi LHP BPK karena menjadi pertimbangan opini Laporan Keuangan, dan entitas wajib menindaklanjuti dalam 60 hari setelah LHP diterima.				
SUMBER DATA				
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan - Sub Bagian Tata Usaha				
CARA MENGHITUNG				
IKK 4.5 = $\sum$ realisasi jumlah rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti (status proses) dalam waktu 60 hari setelah LHP diterima				
SATUAN				
%				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
100%	100%	100%	100%	100%
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Sub Bagian Tata Usaha				

PROGRAM				
DUKUNGAN MANAJEMEN				
KEGIATAN				
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.6	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan	
DEFINISI				
Proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan kearsipan dan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kearsipan tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
SUMBER DATA				
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan - Sub Bagian Tata Usaha				
CARA MENGHITUNG				
<i>IKK 4.6 = ∑ realisasi kegiatan pengawasan kearsipan internal dan sosialisasi kearsipan dalam satu tahun anggaran</i>				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
1	1	1	1	1
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Sub Bagian Tata Usaha				

PROGRAM				
DUKUNGAN MANAJEMEN				
KEGIATAN				
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.7	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	
DEFINISI				
Ukuran keberhasilan sebuah instansi dalam menyelesaikan dan menindaklanjuti keluhan atau aspirasi publik yang masuk melalui sistem LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), menunjukkan sejauh mana komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, melindungi hak warga negara, dan melakukan perbaikan berkelanjutan, menjadi indikator penting dalam evaluasi kinerja pelayanan publik nasional.oses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan kearsipan dan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kearsipan tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
SUMBER DATA				
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan - Sub Bagian Tata Usaha				
CARA MENGHITUNG				
IKK 4.7 = $\sum$ realisasi kegiatan untuk menindak lanjuti jumlah pengaduan yang masuk dalam satu tahun anggaran				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
1	1	1	1	1
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan				
Sub Bagian Tata Usaha				

PROGRAM				
DUKUNGAN MANAJEMEN				
KEGIATAN				
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.8	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	
DEFINISI				
Standar penilaian terukur yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).				
SUMBER DATA				
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan - Sub Bagian Tata Usaha				
CARA MENGHITUNG				
<i>IKK 4.8 = $\sum$ realisasi kegiatan peningkatan tindak lanjut pengaduan masyarakat dalam satu tahun anggaran</i>				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
2	2	2	2	2
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Sub Bagian Tata Usaha				

PROGRAM				
DUKUNGAN MANAJEMEN				
KEGIATAN				
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.9	Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	
DEFINISI				
Ukuran terukur yang menunjukkan sejauh mana suatu unit kerja berhasil membangun komitmen anti-korupsi dan pelayanan prima, melalui perbaikan di enam area perubahan utama: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang berujung pada predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas pelayanan.				
SUMBER DATA				
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan - Sub Bagian Tata Usaha				
CARA MENGHITUNG				
<i>IKK 4.9 = $\sum$ realisasi kegiatan terkait ZI, predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam satu tahun anggaran</i>				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
1	1	1	1	2
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan				
Sub Bagian Tata Usaha				

PROGRAM				
DUKUNGAN MANAJEMEN				
KEGIATAN				
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.10	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat	
DEFINISI				
Alat ukur kuantitatif dan kualitatif untuk menilai kepuasan publik terhadap layanan transportasi, meliputi aspek seperti persyaratan, prosedur, waktu, biaya, kompetensi petugas, hingga sarana prasarana. Hasil IKM menunjukkan seberapa baik pelayanan transportasi telah memenuhi harapan masyarakat, menjadi dasar perbaikan kinerja dan evaluasi keberhasilan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien.				
SUMBER DATA				
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan - Sub Bagian Tata Usaha				
CARA MENGHITUNG				
<i>IKK 4.10 = $\sum$ realisasi kegiatan terkait survey kepuasan pengguna jasa dalam satu tahun anggaran</i>				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
4	4	4	4	4
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan				
Sub Bagian Tata Usaha				

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan



Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002